

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam memajukan kecerdasan bangsa, namun pada kenyataannya pendidikan selalu mengalami ragam problematika yang menyangkut beragam hal. Pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (negara) belum mampu mengakses dan mendidik warganya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat anak yang putus sekolah yang disebabkan dari model pendidikan bentukan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kepedulian masyarakat terhadap pengembangan pendidikan menjadi sangat signifikan.

Berbagai upaya telah dan terus diupayakan pemerintah untuk mewujudkan SDM berkualitas melalui usaha mengembangkan dan memperbaiki kurikulum, sistem evaluasi, sarana pendidikan, dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Akan tetapi upaya tersebut pada kenyataannya, sampai saat ini belum cukup untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Karena pada dasarnya setiap kalangan masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Menurut Mulyasa dan Suderajat yang dikutip oleh Hasim, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan yang tidak

tepat dalam pembangunan di Indonesia. Pendekatan mutu dengan sistem pendidikan sebagai fungsi produksi tidak dilaksanakan dengan baik karena system pelaksanaan pendidikan yang terlalu birokratis dan terpusat. Akibatnya muncul kecenderungan guru dalam mengajar terpaku pada kurikulum baku yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Peran guru yang seharusnya dapat menjadi promotor siswa dalam proses belajar siswa, turun hanya sebatas sebagai pengajar.¹ Keberhasilan pembangunan di era globalisasi dan pasar bebas saat ini memerlukan peran pendidikan yang harus memahami sebenarnya kebutuhan masyarakat.

Model pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, disebut pendidikan berbasis negara (*state-based education*), sedangkan model kedua yang diselenggarakan oleh masyarakat dinamakan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).² Kedua model pendidikan yang ada ini dapat saling melengkapi satu sama lain.

Sebagaimana diungkapkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 disebutkan adanya konsep tentang pendidikan berbasis masyarakat.

¹ Hasim. Moh, “Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat” (PhD diss., Universitas Negeri Semarang, 2007)

² Ica Sulaiman “Pendidikan Berbasis Masyarakat,” *The Blogspot* Februari 2015 di akses tanggal 17 September 2016: <http://ichasulaiman.blogspot.co.id/2015/02/pendidikan-berbasis-masyarakat.html>.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan dengan konsep yang disusun sendiri oleh masyarakat berdasarkan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pandangannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.³ Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat dapat juga mengambil jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 4, diuraikan bahwa:

“Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dan satuan pendidikan yang sejenis.”

Saat ini, pendidikan nonformal adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang mempunyai tugas dan peranan yang sama dengan sistem pendidikan lainnya dalam memberikan pelayanan dalam pendidikan yang bersifat nonformal kepada masyarakat. Sasaran dari pendidikan nonformal yang semakin luas dan menyeluruh tidak hanya sekedar melayani masyarakat yang terpinggirkan (*marginal*) seperti masyarakat buta aksara, anak putus sekolah, dan para lansia, akan tetapi sasaran pendidikan nonformal saat ini sudah menjangkau pada anak-anak usia dini, anak-anak yang bersekolah dalam situasi pembelajaran di rumah atau dapat kita sebut *homeschooling*,

³ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003

serta masyarakat yang membutuhkan sebuah kecakapan-kecakapan tertentu untuk mendapatkan pengalaman kerja.

Persoalan sosial di kota besar memang beragam. Tak terkecuali kasus putus sekolah pada anak, tak peduli meski fasilitas pendidikan di kota sudah memadai. Kota Surabaya pun dihadapkan pada persoalan serupa. Bahkan dari hasil survei yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya terungkap, ada beberapa titik merah yang menyebut jumlah anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolahnya di atas rata-rata seperti di Tambaksari, Jambangan, dan Semampir yang merupakan adalah kawasan padat penduduk. Lebih lanjut, Risma mengatakan, problem anak putus sekolah maupun rentan putus sekolah bukan terletak pada masalah biaya. Sebab, sekolah di Surabaya memang sudah gratis. Menurut dia, inti masalah terletak pada faktor lingkungan yang berdampak pada rendahnya disiplin diri. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap motivasi untuk bersekolah. Inovasi pun dibutuhkan jika ingin mengentaskan persoalan ini.⁴ Dari sini kemudian hadir pendidikan nonformal yang salah satunya adalah pendidikan berbasis masyarakat pada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang dikelola oleh masyarakat yang maksudnya melengkapi, mengisi atau mungkin berupaya mengganti model pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

⁴ Mnhdi, "Permasalahan Anak Putus Sekolah," Cakrawala News 21 September, 2015 diakses pada tanggal 21 September, 2015, <http://cakrawalanews.co/2015/09/21/permasalahan-anak-putus-sekolah-melonjak/>

Menurut Tilaar yang dikutip oleh Toto, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang hidup dari dan untuk masyarakat. Pendidikan yang berdasar pada masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan akan menjadi terasing dari konteks tujuannya apabila partisipasi masyarakat diabaikan, karena pendidikan tidak mampu menjawab kebutuhan dan kebudayaan yang nyata. Pendidikan yang terlepas dari masyarakat dan budaya yang ada di dalamnya adalah pendidikan yang tidak memiliki tanggungjawab.⁵ Pendidikan berbasis masyarakat dan manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah wujud nyata dari demokratisasi dan desentralisasi pendidikan.

Pendidikan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an terdapat pada Surat At-Taubah Ayat 122 :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

⁵ Toto Suharto. "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, November 2005, Th. XXIV, No. 3

Sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah sebagai Khalifah di muka bumi. Manusia mengemban amanat untuk membina masyarakat, memelihara alam lingkungan hidup bersama. Bahkan terutama bertanggung jawab atas martabat kemanusiaannya (*human dignity*).⁶ Jadi manusia sebagai makhluk individu berperan aktif bahkan wajib dalam menyelenggarakan pendidikan baik secara formal atau non formal.

Salah satu lembaga pendidikan nonformal yang perkembangannya terasa cukup pesat dan keberadaannya sangat mendesak adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang digagas oleh masyarakat dari tingkat wilayah kelurahan, kecamatan dan desa. Pesatnya perkembangan PKBM tersebut tidak sejalan dengan kepedulian mendikbud terkait pengembangan pendidikan nonformal.

Dari hasil berita yang dilansir okezone salah satu pendiri pendidikan nonformal Sekolah Perempuan Desa untuk ibu-ibu di Kota Batu, Jawa Timur berkata bahwa selama ini pendidikan nonformal dianaktirikan. Pemerintah hanya fokus pada pendidikan formal, dari Rp50 triliun APBN 2016 untuk pendidikan, sektor pendidikan formal mendapatkan alokasi hampir 99 persen atau Rp48 triliun. Sementara nonformal hanya satu persen lebih atau Rp2

⁶ Arif Kurniawan, "Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif," *Cakrawala News*, Maret 2014, <http://www.membumikanpendidikan.com/2014/03/pendidikan-masyarakat-dalam-perspektif.html>

triliun saja.⁷ Pemenuhan kebutuhan pendidikan nonformal bisa dikatakan masih sangat minim.

Sementara itu, Kepala Bidang Dikmenjur Drs. Sudarminto, M. Pd ketika menerima rombongan BAPPENAS menuturkan, saat ini Surabaya memiliki 38 lembaga PKBM dengan jumlah warga belajar sebanyak 4.463 siswa, sedangkan jumlah LKP mencapai 455 lembaga yang telah terdaftar sedangkan jumlah peserta didik mencapai 65.817 siswa.

Dengan jumlah lembaga dan peserta didik/warga belajar yang cukup banyak tersebut tentunya dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang harus betul-betul dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2016. Pada informasi ini dapat dikatakan bahwa begitu pentingnya pendidikan berbasis masyarakat untuk mendukung tercapainya implementasi pendidikan untuk semua kalangan masyarakat dan juga menjadi wadah dalam memenuhi kekurangan dari pendidikan formal, salah satunya adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Pentingnya keberadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dalam pembelajaran berupaya untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan peserta didik dengan mengakomodasinya melalui pendidikan yang dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat lebih

⁷ Hari Istiawan, "Mendikbud Muhadjir Effendy Wajib Perhatikan Pendidikan Nonformal," *Okezone News*, 28 Juli 2016, <http://news.okezone.com/read/2016/07/28/65/1449098/mendikbud-muhadjir-effendy-wajib-perhatikan-pendidikan-nonformal> diakses tanggal 27 Oktober 2016.

mengetahui dan menyadari kebutuhan dan segala hal yang diinginkannya daripada pemerintah yang mungkin menyelenggarakan pendidikan yang seragam dan beorientasi pada kepentingan tertentu. Namun perlu disadari pula bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada akan eksis dan berjalan dengan baik manakala masyarakat tersebut memiliki kesadaran dan berdaya dalam menyelenggarakan pendidikannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menjalin relasi dalam arti hanya sebagai mitra bukan memberikan intervensinya terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada.

Dari sekian banyak kelompok belajar yang berpartisipasi dalam menerapkan pendidikan berbasis masyarakat, salah satunya adalah PKBM Budi Utama yang merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang digunakan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sejak tahun 2005 yang keberadaannya terus berkembang memperbaiki kualitas pelayanan pendidikannya dan mengikuti kebutuhan masyarakat, pada awalnya PKBM ini memiliki program kejar paket A, B,C kemudian berkembang dengan adanya Kelompok Belajar Alam (KBA) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Manajemen yang baik, sangat diperlukan Pendidikan Berbasis Masyarakat yang jalurnya pada pendidikan nonformal di PKBM Budi Utama ini. Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendidikan Berbasis Masyarakat di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Budi Utama Surabaya.
2. Untuk mengetahui perencanaan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Budi Utama Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengorganisasian di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Budi Utama Surabaya.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Budi Utama Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik Ilmiah
Secara teoritis penelitian ini merupakan sumbangsih untuk pengetahuan sebagai khazanah keilmuan.
2. Sosial Praktis
 - a. Bagi peneliti, merupakan bahan informasi untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dalam mengetahui Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Utama Surabaya dan untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

- b. Untuk lembaga pendidikan, diharapkan mampu memberikan motivasi dan koreksi bagi pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat agar terus berupaya meningkatkan kualitas output terutama dalam hal moral anak didik.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pemahaman, maka menurut penulis perlu adanya penjelasan berbagai istilah yang ada pada judul skripsi ini :

1. **Pendidikan Berbasis Masyarakat** : Pendidikan Berbasis Masyarakat/*Community Based Education* (PBM) /(CBE) terdiri dari tiga kata, yaitu pendidikan, berbasis dan masyarakat. Pendidikan adalah pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam arti luas; artinya pendidikan yang diselenggarakan baik secara sekolah/dulu biasa disebut formal, atau yang diselenggarakan sebagai kursus/di luar sekolah, atau latihan/ magang untuk memperoleh keterampilan, dahulu disebut non-formal, maupun pendidikan yang dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan dan/atau dituturkan di dalam budaya masyarakat, sebelum ini disebut informal. Berbasis berarti “berdasarkan pada” atau “berfokuskan pada”. Masyarakat adalah sebuah kelompok yang hidup dalam daerah khusus (bisa bersifat setempat/lokal/regional atau nasional) yaitu orang-orang yang memiliki

harapan dan dampak terhadap upaya pendidikan di Indonesia walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam status sosial, peranan dan tanggungjawab.⁸

2. **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat** : Menurut Sihombing dan Gutama, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) merupakan suatu wadah dimana seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi, atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. PKBM adalah sebagai wahana untuk mempersiapkan warga masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan masyarakat serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat, definisi PKBM terus disempurnakan terutama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan lembaga, sasaran, kondisi daerah serta model pengelolaan.⁹

⁸ “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Masyarakat,” Google, 23 Januari, 2012 di akses pada tanggal 29 September, 2016.

<https://pmancoffeemix.wordpress.com/2012/01/23/strategi-peningkatan-mutu-pendidikan-melalui-pendekatan-pendidikan-berbasis-masyarakat-community-based-education/>

⁹ “Pengertian Dan Konsep PKBM Menurut Ahli,” Google, Mei, 2015 di akses pada tanggal 29 September, 2016, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dan-konsep-pkbm-menurut-ahli.html>

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) meski sudah ada yang meneliti namun penelitian tentang ini jarang di temukan di Indonesia dibandingkan dengan penelitian tentang Pendidikan Berbasis Sekolah yang sudah banyak dilakukan penelitian. Adapun literature dan karya ilmiah terdahulu yang berhasil peneliti temukan adalah sebagai berikut :

Skripsi Eroby Jawi Fahmi, “Pendidikan Berbasis Masyarakat Studi Tentang Rumah Pengetahuan Amartya Bantul, 2008. Dalam penelitian tersebut di paparkan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA lahir dengan ide besar untuk menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan, menyamaratakan kesempatan pendidikan bagi kalangan miskin, dan mendekatkan proses pendidikan dengan realitas pendidikan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pendidikan berbasis masyarakat. Perbedaannya terletak pada studi penelitian, penelitian ini meneliti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Utama Surabaya sedangkan skripsi tersebut di Rumah Pengetahuan Amartya Bantul dan pada focus penelitian yang berbeda.

Tesis Purnomo, “*Community Based Education* Dalam Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Al-Aqsha IAIN Surakarta, 2015. Pada penelitian ini terdapat konsep, praktik dan factor pendukung serta penghambat dari CBE. Persamaan tesis tersebut dengan

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pendidikan berbasis masyarakat. Perbedaannya terletak pada studi penelitian, penelitian ini meneliti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Utama Surabaya sedangkan tesis tersebut di Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Al-Aqsha IAIN Surakarta dan juga pada focus penelitian dan metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan pada tesis tersebut menggunakan metode kualitatif lapangan studi kasus.

Tesis Tika Indah Sari, Analisis Efektifitas Pengelolaan Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat Studi Evaluatif di PKBM Sriwijaya Sawah Lebar Kota Bengkulu 2013. Hasil penelitian ini menjawab bahwa pengelolaan PKBM berjalan efektif Semua perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi terhadap program-program yang akan dilaksanakan di PBKM, sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pengelolaan PKBM yang telah ditentukan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada metode yang di gunakan, pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Toto Suharto. Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Th. XXIV, No 3. November 2005. Dalam jurnal ini mengkaji dengan telaah filosofis bermaksud mengungkap ide-ide dan konsep-konsep dasar yang terkandung dalam pendidikan berbasis masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada pembahasan, penelitian tersebut merupakan penelitian telaah filosofis tentang pendidikan berbasis masyarakat sedangkan penelitian ini lebih meneliti data-data yang ada di lapangan.

Deny Firmansyah Sutisna et al. Peranan PKBM dalam Menumbuhkan Minat dalam Pendidikan di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Universitas Padjajaran Volume 1, No 1, 2012. Inti dari penelitian ini adalah mengenai peranan pendidikan nonformal yang salah satunya adalah PKBM dalam menumbuhkembangkan minat membaca warga belajar program sekolah kejar paket C yang setara dengan SMA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada masalah yang diteliti pada penelitian tersebut meneliti program Taman Bacaan Masyarakat sedangkan penelitian ini meneliti secara keseluruhan program PKBM Budi Utama Surabaya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, ruang lingkup penelitian, definisi konseptual, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang kajian teori diungkapkan deskripsi teoritis tentang masalah yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu : a) Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat, b) Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat c) Peran dan Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat d) pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat e) Tujuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat f) standart minimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Bab III, bab ini membahas tentang metode penelitian yang relevan, jenis penelitian, informan, jenis dan sumber data, tahap tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data teknik keabsahan data.

Bab IV, bab ini akan disajikan laporan penelitian dan analisa data tentang 1) Bagaimana Pendidikan Berbasis Masyarakat di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Budi utama ? 2) Bagaimana perencanaan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Budi Utama Surabaya? 3) Bagaimana pengorganisasian di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Budi Utama Surabaya? 4) Bagaimana pelaksanaan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Budi Utama Surabaya?

Bab V, bab ini dipaparkan penutup hasil akhir dari sebuah penelitian yang mencakup simpulan dan saran.